



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 90 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2022**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 90**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
GARUT KOTA TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Kecamatan Garut Kota sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Garut Kota telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Tema Pembangunan Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh

Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan tahun 2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 549);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11 );
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
31. Keputusan Camat Garut Kota Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
32. Keputusan Camat Garut Kota Nomor : 050/26-Kec/2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Garut Kota guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Garut Kota;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2021**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.1.1 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Garut Kota tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Garut Kota sudah disahkan.

2.1.2 Capaian target Renstra Kecamatan Garut Kota berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Garut Kota tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Garut Kota;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Garut Kota;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN.**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Garut Kota.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Garut Kota Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Garut Kota ini menyajikan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Garut Kota Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 10.620.374.086,- dengan kegiatan sebagai berikut :
  - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 30.788.900,-
  - ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 8.583.657.821,- dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp. 8.557.907.821,-
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp. 25.750.000,-
  - ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp. 61.800.000,-

- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 1.221.681.071,- dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 78.391.700,-
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 609.192.871,-
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 69.536.200,-
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran Rp. 167.541.100,-
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 38.459.200,-
    - Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 155.600.000,-
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp. 102.960.000,-
  - ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah Rp. 42.153.700,- dengan Sub kegiatan :
    - Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 42.153.700,-
  - ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah Rp. 337.681.094 dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 82.838.112,-
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 14.200.000,-
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp. 240.642.982,-
  - ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran Rp. 342.611.500,- dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp. 29.010.000,-
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 313.601.500,-
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, jumlah anggaran Rp. 386.740.300,- dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 314.860.800,- dengan Sub Kegiatan
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 314.860.800,-

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 71.879.500,- dengan Sub Kegiatan :
  - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 71.879.500,-

2. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan Sub Kegiatan :
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, anggaran Rp. 163.183.500,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon, anggaran Rp. 970.242.100,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan, anggaran Rp. 806.803.400,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 917.010.700,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon, anggaran Rp. 635.932.300,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding, anggaran Rp. 915.744.110,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri, anggaran Rp. 803.962.600,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen, anggaran Rp. 805.906.200,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 917.010.700,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir, anggaran Rp. 917.011.105,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol, anggaran Rp. 939.759.950,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla, anggaran Rp. 888.283.700,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang, anggaran Rp. 760.658.100,-
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 917.010.700,-

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon, anggaran Rp. 635.932.300,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding, anggaran Rp. 915.744.110,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri, anggaran Rp. 803.642.600,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen, anggaran Rp. 805.906.200,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir, anggaran Rp. 917.011.105,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol, anggaran Rp. 939.759.950,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla, anggaran Rp. 888.283.700,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang, anggaran Rp. 760.658.100,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Kulon, anggaran Rp. 31.757.900,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan, anggaran Rp. 195.196.600,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 84.989.400,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuwon, anggaran Rp. 366.067.800,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muarasanding, anggaran Rp. 86.256.000,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamentri, anggaran Rp. 198.357.400,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paminggir dengan anggaran Rp. 84.989.142,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Regol, anggaran Rp. 62.240.100,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukanegla dengan anggaran Rp. 113.716.300,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cimuncang dengan anggaran Rp. 241.341.900,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan dengan anggaran Rp. 195.196.600,-

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 3.927.178.000,-
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 163.544.200,-
    - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Semua Kelurahan, anggaran Rp. 50.000.000,-
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.100,-

### **2.1.1 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2021**

- Anggaran sesudah Perubahan Tahun 2021
  - 1) Realisasi program/kegiatan sampai dengan Bulan Juni 2021
 

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota dalam pelaksanaan Renja 2021, antara lain :

    1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 10.620.374.086,- dengan kegiatan sebagai berikut :
      - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran Rp. 30.788.900,- dengan realisasi anggaran Rp. -
      - ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 8.583.657.821,- dengan Sub Kegiatan :
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp. 8.557.907.821,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.240.879.173

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran sebesar Rp.25.750.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.022.500,-
- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp. 61.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 1.221.681.071,- dengan Sub Kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 78.391.700,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.582.700,-
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 609.191.672,- dengan realisasi anggaran Rp. 104.654.400,-
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 69.536.200,-
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran Rp. 167.542.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 55.510.700,-
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 38.459.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.778.400,-
  - Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 155.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 51.840.000,-
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp. 102.960.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 31.920.000,-
- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah Rp. 42.153.700,- dengan Sub kegiatan :
  - Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 42.153.700,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah Rp. 337.681.094 dengan Sub Kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 82.838.112,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.124.704,-
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 14.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.680.000,-
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp. 240.642.982,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.604.400,-
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran Rp. 342.611.500,- dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp. 29.010.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.131.900,-
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 313.601.500,- dengan realisasi anggaran Rp. -
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, jumlah anggaran Rp. 386.740.300,- dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 314.860.800,- dengan Sub Kegiatan
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 314.860.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 156.275.100,-
  - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 71.879.500,- dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 71.879.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 33.100.000,-
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, anggaran 163.183.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 91.783.500,-
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon, anggaran Rp. 970.242.100,- dengan realisasi anggaran Rp. -
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan, anggaran Rp. 806.803.400,- dengan realisasi anggaran Rp. -
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 917.010.700,- dengan realisasi anggaran Rp. 40.832.000,-
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon, anggaran Rp. 635.932.300,- dengan realisasi anggaran Rp. -
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding, anggaran Rp. 915.744.110,- dengan realisasi anggaran Rp. -
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri, anggaran Rp. 803.962.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 153.252.000,-
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen, anggaran Rp. 805.906.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 90.101.000,-



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir, anggaran Rp. 917.011.105,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol, anggaran Rp. 939.759.950,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla, anggaran Rp. 888.283.700,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang, anggaran Rp. 760.658.100,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Kulon, anggaran Rp. 31.757.900,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan, anggaran Rp. 195.196.600,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 84.989.400,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuwon, anggaran Rp. 366.067.800,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muarasanding, anggaran Rp. 86.256.000,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamentri, anggaran Rp. 198.357.400,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paminggir dengan anggaran Rp. 84.989.142,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Regol, anggaran Rp. 62.240.100,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukanegla dengan anggaran Rp. 113.716.300,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cimuncang dengan anggaran Rp. 241.341.900,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan dengan anggaran Rp. 195.196.600,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- ❖ Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Kota Kulon, anggaran sebesar Rp. 7.202.300,- dengan realisasi anggaran Rp. -
  - Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Kota Wetan, anggaran sebesar Rp. 6.855.600,- dengan realisasi anggaran Rp. -
  - Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Margawati, anggaran sebesar Rp. 4.352.320,- dengan realisasi anggaran Rp.-



- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Pakuwon, anggaran sebesar Rp. 21.850.045,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Muarasanding, anggaran sebesar Rp. 6.065.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.065.000,-
- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Sukamentri, anggaran sebesar Rp. 7.435.100,- dengan realisasi anggaran Rp. -
- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Paminggir dengan anggaran sebesar Rp. 6.715.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.715.000,-
- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Regol, anggaran sebesar Rp. 8.034.850 dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Ciwalen dengan anggaran sebesar Rp. 33.385.200,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Sukanegla dengan anggaran sebesar Rp. 4.329.300,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Cimuncang dengan anggaran sebesar Rp. 6.432.600 dengan realisasi anggaran Rp.-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Kota Kulon, anggaran sebesar Rp. 139.147.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 55.983.500,-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Kota Wetan, anggaran sebesar Rp. 188.341.000,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Margawati, anggaran sebesar Rp. 123.981.080 dengan realisasi anggaran Rp.-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Pakuwon, anggaran sebesar Rp. 173.877.200,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Muarasanding, anggaran sebesar Rp. 151.864.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 90.364.500,-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Sukamentri, anggaran sebesar Rp. 184.539.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 111.388.000,-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Paminggir dengan anggaran sebesar Rp. 170.115.282,- dengan realisasi anggaran Rp. 91.183.500,-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Regol, anggaran sebesar Rp. 191.000.100,- dengan realisasi anggaran Rp.-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Ciwalen dengan anggaran sebesar Rp. 162.708.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 113.808.500,-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Sukanegla dengan anggaran sebesar Rp. 109.387.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 45.963.000,-
- Penanganan Covid-19 di Kelurahan Cimuncang dengan anggaran sebesar Rp. 176.456.000,- dengan realisasi anggaran Rp.-

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 3.927.178.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.606.850.000,-
  - 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :
    - ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :
      - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 163.544.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 85.187.000,-
  - 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :
    - ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 90.570.000,-
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Pada Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota dalam pelaksanaan Renja 2021 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :
- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 91,08% dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 51.600.000,- terealisasi Rp. 46.996.240,-
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota.
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya perubahan anggaran pada program/kegiatan karena adanya penyesuaian anggaran karena adanya Wabah Covid 19, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan.
  - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
  - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut :

- 1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Garut Kota pada umumnya.
  - 2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Garut Kota berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Garut Kota
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan.

### **2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2021**

Renstra SKPD Kecamatan Garut Kota merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Garut Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Garut Kota yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah


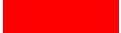


Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Garut Kota**  
**Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	81	Triwulan 1					
					Triwulan 2	81	82,72	82,72		
					Triwulan 3					
					Triwulan 4					
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>82,72</b>	<b>82,72</b>		

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Indikator kinerja yang pada Triwulan II mencapai target 82,72 point yaitu Indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD  
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga Triwulan II anggaran 2021 mencapai 82,72 point atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2020-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Garut Kota dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Garut Kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7		Urusan Wajib									
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan									
7	01	18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	-	100 %	-	-	
7	01	18	01	002	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	91%	100 %	91%	91%
7	01	18	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Terlaksananya penunjang kegiatan di lingkungan kantor	100 %	96,5 %	100 %	96,5 %	96,5 %
7	01	18	01	008	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100 %	73%	100 %	73%	73%
7	01	18	01	009	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	99%	100 %	99%	99%
7	01	18	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	99%	100 %	99%	99%
7	01	18	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya	100 %	92%	100 %	92%	92%
7	01	18	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	96,4%	100 %	96,4%	96,4%
7	01	18	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan rumah tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan pegawai	100 %	99,8%	100 %	99,8%	99,8%
7	01	18	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	100 %	100%	100 %	100%	100%
7	01	18	01	077	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %	99,7%	100 %	99,7%	99,7%
7	01	18	01	092	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan	Terlaksananya	100 %	-	100 %	-	-

					keluar Daerah	penyelenggaraan pemerintahan kecamatan								
7	01	18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %		100 %	78,4%	78,4%	100 %	78,4%-	78,4%
7	01	18	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas (operasional)	Jumlah Kendaraan Dinas	96,7%	96,7%	100 %	96,7%	96,7%	100 %	96,7%	96,7%
7	01	18	02	007	Kegiatan Pengadaan Pelengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100%	-	100 %	-	-	100 %	-	-
7	01	18	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Rumah dinas yang memadai	100%	-	100 %	-	-	100 %	-	-
7	01	18	02	010	Pengadaan Meubeulair	Jumlah meubeulair sesuai kebutuhan	100%	-	100 %	-	-	100 %	-	-
7	01	18	02	021	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang memadai	100%	99,9%	100 %	99,9%	99,9%	100 %	99,9%	99,9%
7	01	18	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang Dipelihara	100%	96,4%	100 %	96,4%	96,4%	100 %	96,4%	96,4%
7	01	18	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memadai	100%	60%	100 %	60%	60%	100 %	60%	60%
7	01	18	02	045	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah lokasi penataan halaman	100 %	99,7%	100 %	99,7%	99,7%-	100 %	99,7%	99,7%
7	01	18	02	315	Rehab Gedung Kantor	Jumlah lokasi kantor yang direhab	100 %	99,8%	100 %	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%
7	01	18	11		Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	76%	100 %	76%	76%-	100 %	76%	76%
7	01	18	11	001	Pelaporan Keuangan	Waktu pelaporan keuangan	100 %	82,4%	100 %	82,4%	82,4%	100 %	82,4%	82,4%
7	01	18	11	002	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan perencanaan	100 %	73,6%	100 %	73,6%	73,6%	100 %	73,6%	73,6%
7	01	18	82		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan	100%	93%	100 %	93%	-	93%	93%	93%
7	01	18	82	019	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Waktu Pembinaan dan monitoring	100 %	92%	100 %	92%	100 %	100 %	92%	92%
7	01	18	82	066	Peningkatan Gotong Royong Masyarakat	Lamanya penerimaan upah gotong royong	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	82	088	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)	Jumlah Kelurahan yang menerima insentif Kadernya	100 %	96%	100 %	96%	100 %	96%	96%	96%
7	01	18	82	099	Monitoring dan Pembinaan RT RW	Jumlah Kelurahan yang menerima insentif Kadernya	100 %	87,4%	100 %	87,4%	100 %	87,4%	87,4%	87,4%
7	01	18	82	130	Kegiatan Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	Jumlah Monitoring BPNT Kelurahan	100 %	95,3%	100 %	95,3%	100 %	95,3%	11,5%	11,5%
7	01	18	82	132	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	95,8%	100 %	95,8%	100%	95,8%	95,8%	95,8%
7	01	18	82	144	Penyelenggaraan Upacara Hari besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Pelaksanaan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional	100 %	73,9%	100 %	73,9%	73,9%	100 %	73,9%	73,9%

						dan Upacara/Acara Lainnya													
7	01	18	82	145	Kegiatan TP PKK tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	100 %	98%	100 %	98%	98%	100 %	98%	98%					
7	01	18	82	147	Monitoring kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan	Pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan	100 %	89,7%	100 %	89,7%	89,7%	100 %	89,7%	89,7%					
7	01	18	82	151	Kegiatan TP PKK tingkat Kelurahan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kelurahan	100 %	99%	100 %	99%	99%	100 %	99%	99%					
7	01	18	82	162	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%					
7	01	18	82	163	Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%					
7	01	18	83	002	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan	100 %	77,5%	100 %	77,5%	77,5%	100 %	77,5%	77,5%					
7	01	18	83	006	SIPELAT (Sistem Pelayanan Antar Ke Tempat)	Pelaksanaan SIPELAT (Sistem Pelayanan Antar Ke Tempat)	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%					
7	01	18	83	009	KUTEMPUH (Kunjungan Tempat Jauh)	Pelaksanaan KUTEMPUH (Kunjungan Tempat Jauh)	100 %	89,6%	100 %	89,6%	89,6%	100 %	89,6%	89,6%					
7	01	18	86		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100 %		100 %			100 %							
7	01	18	86	056	Pembangunan Drainase dan Selokan Kelurahan Kota Wetan	Jumlah Lokasi Pembangunan Drainase dan Selokan Kelurahan Kota Wetan	100%	-	100 %	-	-	100 %	-	-					
7	01	18	86	057	Pembangunan Jalan Pemukiman Kelurahan Kota Wetan	Panjang Pembangunan Jalan Pemukiman Kelurahan Kota Wetan	100%	99,8%	100 %	99,8%	99,8%	100 %	99,8%	99,8%					
7	01	18	86	058	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Kota Wetan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MCK Kelurahan Kota Wetan	100%	99,8%	100 %	99,8%	99,8%	100 %	99,8%	99,8%					
7	01	18	86	059	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Kota Wetan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Kota Wetan	100 %	99,8%	100 %	99,8%	100 %	99,8%	99,8%	99,8%					
7	01	18	86	061	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan/Hotmix Jalan Lingkungan Kelurahan Kota Kulon	Panjang Pembangunan Jalan Lingkungan/Hotmix Jalan Lingkungan Kelurahan Kota Kulon	100 %	99,9%	100 %	99,9%	100 %	99,9%	99,9%	99,9%					
7	01	18	86	063	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Selokan Saluran Air Kelurahan Kota Kulon	Jenis, Volume dan Lokasi Pemeliharaan Drainase dan Selokan Saluran Air Kelurahan Kota Kulon	100 %	99,4%	100 %	99,4%	100 %	99,4%	99,4%	99,4%					
7	01	18	86	064	Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Kota Kulon	Jumlah Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Kota Kulon	100 %	99,8%	100 %	99,8%	100%	99,8%	99,8%	99,8%					



7	01	18	86	065	Pengadaan Pompa Kebakaran Api Ringan Kelurahan Kota Kulon	Jumlah Pengadaan Pompa Kebakaran Api Ringan Kelurahan Kota Kulon	100 %	57,9%	100 %	57,9%	100%	57,9%	57,9%	57,9%
7	01	18	86	066	Pembangunan Posyandu Kelurahan Paminggir	Pelaksanaan Pembangunan Posyandu Kelurahan Paminggir	100 %	99%	100 %	99%	100%	99%	99%	99%
7	01	18	86	067	Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Kelurahan Paminggir	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Kelurahan Paminggir	100 %	99%	100 %	99%	100%	99%	99%	99%
7	01	18	86	068	Pemeliharaan Drainase Kelurahan Paminggir	Pelaksanaan Pemeliharaan Drainase Kelurahan Paminggir	100 %	99%	100 %	99%	100%	99%	99%	99%
7	01	18	86	069	Sarana Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Paminggir	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah Kelurahan	100 %	99,6%	100 %	99,6%	100%	99,6%	99,6%	99,6%
7	01	18	86	070	Pembangunan MCK Kelurahan Paminggir	Pelaksanaan Pembangunan MCK Kelurahan Paminggir	100 %	-	100 %	-	100%	-	-	-
7	01	18	86	071	Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Ciwalen	Pelaksanaan Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Ciwalen	100 %	96,6%	100 %	96,6%	100%	96,6%	96,6%	96,6%
7	01	18	86	072	Pemeliharaan Drainase Kelurahan Ciwalen	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Drainase Kelurahan Ciwalen	100 %	99,7%	100 %	99,7%	100%	99,7%	99,7%	99,7%
7	01	18	86	073	Pemeliharaan MCK Kelurahan Ciwalen	Jumlah Lokasi Pemeliharaan MCK Kelurahan Ciwalen	100 %	99,9%	100 %	99,9%	100%	99,9%	99,9%	99,9%
7	01	18	86	074	Pembangunan SPAL Kelurahan Ciwalen	Jumlah Lokasi Pembangunan SPAL Kelurahan Ciwalen	100 %	99,9%	100 %	99,9%	100%	99,9%	99,9%	99,9%
7	01	18	86	075	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Ciwalen	Jumlah Paket Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Ciwalen	100 %	96%	100 %	96%	100%	96%	96%	96%
7	01	18	86	077	Pemb. Spal/Limbah Domestik Kelurahan Muarasanding	Lokasi Pemb. Spal/Limbah Domestik Kelurahan Muarasanding	100 %	96%	100 %	96%	100 %	96%	96%	96%
7	01	18	86	078	Pemeliharaan MCK Kelurahan Muarasanding	Lokasi Pemeliharaan MCK Kelurahan Muarasanding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	86	079	Pemb. Posyandu Kelurahan Muarasanding	Lokasi Pemb. Posyandu Kelurahan Muarasanding	100 %	99,9%	100 %	99,9%	100 %	99,9%	99,9%	99,9%
7	01	18	86	080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Muarasanding	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Posyandu Kelurahan Muarasanding	100 %	98,7%	100 %	98,7%	100 %	98,7%	98,7%	98,7%
7	01	18	86	081	Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Kelurahan Muarasanding	Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase Kelurahan Muarasanding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	86	082	Pembangunan Perpipaan Air Bersih Kelurahan Muarasanding	Pelaksanaan Pembangunan Perpipaan Air Bersih Kelurahan Muarasanding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	86	083	Pemb. Jaling Kelurahan Muarasanding	Lokasi Pemb. Jaling Kelurahan Muarasanding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	86	084	Pembangunan Taman Bacaan Kelurahan Muarasanding	Pelaksanaan Pemb. Taman Bacaan Kelurahan Muarasanding	100 %	99,9%	100 %	99,9%	100 %	99,9%	99,9%	99,9%

7	01	18	86	085	Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Regol	Pelaksanaan Pemeliharaan Posyandu Kelurahan Regol	100 %	99,8%	100 %	99,8%	100 %	99,8%	99,8%	99,8%
7	01	18	86	086	Pemeliharaan Drainase Kelurahan Regol	Lokasi Pemeliharaan Drainase Kelurahan Regol	100 %	99,7%	100 %	99,7%	100 %	99,7%	99,7%	99,7%
7	01	18	86	087	Pembangunan MCK Kelurahan Regol	Pelaksanaan Pembangunan MCK Kelurahan Regol	100 %	99,4%	100 %	99,4%	100 %	99,4%	99,4%	99,4%
7	01	18	86	089	Pembangunan Posyandu Kelurahan Regol	Jumlah Lokasi Pembangunan Posyandu Kelurahan Regol	100 %	99,8%	100 %	99,8%	100 %	99,8%	99,8%	99,8%
7	01	18	86	090	Pengadaan Roda Sampah Kelurahan Regol	Jumlah Pengadaan Roda Sampah Kelurahan Regol	100 %	99,6%	100 %	99,6%	100 %	99,6%	99,6%	99,6%
7	01	18	86	091	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Regol	Jumlah Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Regol	100 %	90,7%	100 %	90,7%	100 %	90,7%	90,7%	90,7%
7	01	18	86	092	Pembangunan Jalan Pemukiman Kelurahan Regol	Pelaksanaan Pembangunan Jalan Pemukiman Kelurahan Regol	100 %	99,7%	100 %	99,7%	100 %	99,7%	99,7%	99,7%
7	01	18	86	093	Jaling (Betonisasi. Hotmix. Kirmir) Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Jaling (Betonisasi. Hotmix. Kirmir) Kelurahan Sukamentri	100 %	-	100 %	-	100 %	-	-	-
7	01	18	86	094	Pembangunan Posyandu Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pembangunan Posyandu Kelurahan Sukamentri	100 %	97%	100 %	97%	100 %	97%	97%	97%
7	01	18	86	095	Drainase Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Drainase Kelurahan Sukamentri	100 %	95,9%	100 %	95,9%	100 %	95,9%	95,9%	95,9%
7	01	18	86	096	Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan Kelurahan Sukamentri	100 %	54,4%	100 %	54,4%	100 %	54,4%	54,4%	54,4%
7	01	18	86	097	Alat Posyandu Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pengadaan Alat Posyandu Kelurahan Sukamentri	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
7	01	18	86	098	Pembangunan Drainase Kelurahan Pakuwon	Panjang Pembangunan Drainase Kelurahan Pakuwon	100 %	-	100 %	-	100 %	-	-	-
7	01	18	86	099	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Pakuwon	Panjang Pembangunan Jaling Kelurahan Pakuwon	100 %	99,5%	100 %	99,5%	100 %	99,5%	99,5%	99,5%
7	01	18	86	100	Pengadaan PJU Kelurahan Pakuwon	Jumlah Pengadaan PJU Kelurahan Pakuwon	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
7	01	18	86	101	Pembangunan Posyandu Kelurahan Pakuwon	Lokasi Pembangunan Posyandu Kelurahan Pakuwon	100 %	99,5%	100 %	99,5%	100 %	99,5%	99,5%	99,5%
7	01	18	86	102	Pembangunan Taman Baca Kelurahan Pakuwon	Lokasi Pembangunan Taman Baca Kelurahan Pakuwon	100 %	99,9%	100 %	99,9%	100 %	99,9%	99,9%	99,9%
7	01	18	86	103	Pengadaan Perlengkapan Posyandu Kelurahan Pakuwon	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Posyandu Kelurahan Pakuwon	100 %	99%	100 %	99%	100 %	99%	99%	99%
7	01	18	86	104	Pengadaan Pemadam Api Ringan Kelurahan Pakuwon	Jumlah Pengadaan Pemadam Api Ringan Kelurahan Pakuwon	100 %	99,6%	100 %	99,6%	100 %	99,6%	99,6%	99,6%
7	01	18	86	105	Pemeliharaan dan Perbaikan Selokan Kelurahan Pakuwon	Jumlah Lokasi Pemeliharaan dan Perbaikan Selokan Kelurahan Pakuwon	100 %	99,7%	100 %	99,7%	100 %	99,7%	99,7%	99,7%
7	01	18	86	106	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Untuk Umum	Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mandi, Cuci,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



7	01	18	87	048	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kota Wetan	Jumlah Peserta Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kota Wetan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	050	Pelatihan Usaha Kelurahan Kota Wetan	Jumlah Peserta Sosialisasi Dampak Narkoba dan Penanggulangannya Kelurahan Kota Wetan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	051	Pelayanan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Kota Wetan	Jumlah Peserta Pelayanan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Kota Wetan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	052	Pelayanan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Kelurahan Kota Kulon	Jumlah Peserta Pelayanan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Kelurahan Kota Kulon	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	055	Sosialisasi KB Kelurahan Kota Kulon	Jumlah Peserta Sosialisasi KB Kelurahan Kota Kulon	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	058	Penguatan Kapasitas Tenaga Keamanan Kelurahan Paminggir	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Tenaga Keamanan Kelurahan Paminggir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	059	Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan Paminggir	Pelaksanaan Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan Paminggir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	060	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ciwalen	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ciwalen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	061	Edukasi Proteksi Kebakaran Kelurahan Ciwalen	Jumlah Peserta Edukasi Proteksi Kebakaran Kelurahan Ciwalen	100 %	98%	100 %	98%	100 %	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
7	01	18	87	062	Sosialisasi KB Kelurahan Ciwalen	Jumlah Peserta Sosialisasi KB Kelurahan Ciwalen	100 %	92,7%	100 %	92,7%	100 %	92,7%	92,7%	92,7%	92,7%	92,7%	92,7%	92,7%	92,7%
7	01	18	87	063	Pengelolaan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Ciwalen	Jumlah Peserta Pengelolaan Kegiatan Hidup Bersih Kelurahan Ciwalen	100 %	93,9%	100 %	93,9%	100 %	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%	93,9%
7	01	18	87	064	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Ciwalen	Jumlah Peserta Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Ciwalen	100 %	99%	100 %	99%	100 %	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
7	01	18	87	065	Pelatihan Khusus Seni Budaya Kelurahan Ciwalen	Jumlah Peserta Pelatihan Khusus Seni Budaya Kelurahan Ciwalen	100 %	99,5%	100 %	99,5%	100 %	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
7	01	18	87	067	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Regol	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Regol	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	18	87	068	Edukasi Proteksi Kebakaran Kelurahan Regol	Jumlah Peserta Edukasi Proteksi Kebakaran Kelurahan Regol	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	18	87	069	Sosialisasi KB Kelurahan Regol	Jumlah Peserta Sosialisasi KB Kelurahan Regol	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	18	87	070	Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Regol	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Lembaga	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

						Kemasyarakatan Kelurahan Regol													
7	01	18	87	071	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Regol	Jumlah Peserta Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Regol	100 %	90%	100 %	90%	100 %	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	01	18	87	072	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Regol	Jumlah Peserta Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Regol	100 %	90%	100 %	90%	100 %	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	01	18	87	073	Pelatihan Linmas Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pelatihan Linmas Kelurahan Sukamentri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	074	Pelatihan PHBS Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pelatihan PHBS Kelurahan Sukamentri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	075	Pelatihan Kader Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pelatihan Kader Kelurahan Sukamentri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	076	Pelatihan RT RW Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pelatihan RT RW Kelurahan Sukamentri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	077	Pelatihan Siaga Kebakaran Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pelatihan Siaga Kebakaran Kelurahan Sukamentri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	078	Pelatihan Usaha Mikro Kelurahan Sukamentri	Pelaksanaan Pelatihan Usaha Mikro Kelurahan Sukamentri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	079	Pelatihan Proteksi Kebakaran Kelurahan Pakuwon	Jumlah Peserta Pelatihan Proteksi Kebakaran Kelurahan Pakuwon	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	080	Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Pakuwon	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Pakuwon	100 %	99%	100 %	99%	100 %	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
7	01	18	87	081	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pakuwon	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pakuwon	100 %	99%	100 %	99%	100 %	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
7	01	18	87	082	Pelatihan Usaha Kelurahan Pakuwon	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Kelurahan Pakuwon	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	18	87	083	Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Pakuwon	Jumlah Peserta Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Pakuwon	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	18	87	084	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sukanegla	Jumlah Peserta Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Sukanegla	100 %	99,5%	100 %	99,5%	100 %	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
7	01	18	87	085	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Sukanegla	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Sukanegla	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	18	87	086	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat (RT & RW) Kelurahan Sukanegla	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat (RT & RW) Kelurahan Sukanegla	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	18	87	087	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Margawati	Jumlah Peserta Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Margawati	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	18	87	088	Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan Margawati	Jumlah Peserta Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan Margawati	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
7	01	18	87		Peningkatan Kapasitas RT dan RW Kelurahan Margawati	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas RT dan RW Kelurahan Margawati	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Garut Kota sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan masyarakat			77	81	83	84	85	70	75	70	
2	Persentase pelayanan yang dapat ditindak lanjuti			70%	75%	80%	85%	90%	70	75	70	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berkriteria baik			75 %	79%	80 %	81 %	82 %	100 %	75	75 %	
				B	B	B	B	B	B	BB	B	



## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Garut Kota bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

### 1) **Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

### 2) **Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### 3) **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

## **2.4 Review terhadap RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Garut Kota serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Garut Kota

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2021 yang diusulkan Kecamatan Garut Kota sebesar Rp. 26.533.020.793,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Garut Kota diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2021 Kecamatan Garut Kota mengusulkan 5 (lima) Program dengan (empat belas) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Garut Kota mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Garut Kota

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2021					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2021					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>12,478,636,933</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>12,478,636,933</b>	
	<b>Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>		<b>30.788.900</b>	<b>Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>		<b>30.788.900</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	30.788.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	30.788.900	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8,586,232,821</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8,586,232,821</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	8.557.907.821	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Garut Kota	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	8.557.907.821	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	25.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Garut Kota	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	25.750.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>61.800.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>61.800.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18 orang	61.800.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Garut Kota	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18 orang	61.800.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1,254,432,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1,254,432,000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Item	78.391.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Garut Kota	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Item	78.391.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	4 Jenis	609.192.871	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Garut Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	4 Jenis	609.192.871	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	9 Item	69.536.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Garut Kota	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	9 Item	69.536.200	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	167.541.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Garut Kota	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	167.541.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	1 Tahun	38.459.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Garut Kota	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	1 Tahun	38.459.200	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	155.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Garut Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	155.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	102.960.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Garut Kota	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	102.960.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,141,055,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,141,055,000</b>	
	Pengadaan Mebel		Jumlah item Pengadaan Mebel	12 Paket	46,370,000	Pengadaan Mebel	Garut Kota	Jumlah item Pengadaan Mebel	12 Paket	46,370,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dibangun	1 Gedung	1,094,685,000					1,094,685,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>363,158,112</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>363,158,112</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	82.838.112	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	82.838.112	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	10 unit	15.620.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	10 unit	15.620.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	4 jenis	264,700,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	4 jenis	264,700,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,031,911,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,031,911,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	26 unit	31,911,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	26 unit	31,911,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan yang terpelihara	6 Gedung	1,000,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan yang terpelihara	6 Gedung	1,000,000,000	

<b>II</b>	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan</b>		<b>425,413,000</b>	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan</b>		<b>425,413,000</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>		<b>346,346,000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>		<b>346,346,000</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	346,346,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	346,346,000
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>79,067,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>79,067,000</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Jenis Pelayanan PATEN		79,067,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Jenis Pelayanan PATEN		79,067,000
<b>III</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>16,623,596,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>16,623,596,000</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>12,303,701,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>12,303,701,000</b>
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Dokumen RPTK	1 Laporan	179,501,000	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Dokumen RPTK	1 Laporan	179,501,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	10,297,093,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	10,297,093,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	1,827,107,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	1,827,107,000
						Evaluasi Kelurahan		Jumlah Lokasi Kegiatan	4 kali	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>4,319,895,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>4,319,895,000</b>
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	4,319,895,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	4,319,895,000

<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Trantibum</b>		<b>234.898,000</b>	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Trantibum</b>		<b>234.898,000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>163.544.200</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>163.544.200</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	163.544.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	163.544.200	
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemerintahan Umum</b>			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemerintahan Umum</b>			
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>230.000.100</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>230.000.100</b>	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan	230.000.100	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan	230.000.100	
<b>JUMLAH</b>					<b>26.533.020.793</b>						<b>26.533.020.793</b>

Tabel. 3.1  
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Garut Kota

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2022					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan 2022					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>12,478,636,933</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>12.415.710.370</b>	
	<b>Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>		<b>33.868.000</b>	<b>Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>		<b>31.559.500</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	<b>33.868.000</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Garut Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	31.559.500	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8,586,232,821</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8.651.241.950</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	8.557.907.821	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Garut Kota	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	8.636.448.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	28.325.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Garut Kota	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	14.793.500	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>67.980.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>66.800.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	67.980.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Garut Kota	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 orang	66.800.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1,254,432,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.268.025.208</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Item	86.232.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Garut Kota	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Item	82.072.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	4 Jenis	670.100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Garut Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	4 Jenis	650.251.600	



	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	9 Item	76.490.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Garut Kota	Jumlah jenis penyediaan peralatan Rumah tangga	9 Item	38.541.600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	194.895.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Garut Kota	Jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	195.598.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	1 Tahun	42.305.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Garut Kota	Jumlah Surat Kabar sesuai kebutuhan	12 Bulan	42.211.500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Kali	171.160.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Garut Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	171.150.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	13.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Garut Kota	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	88.200.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1,141,055,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pelaporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>35.136.100</b>	
	Pengadaan Mebel		Jumlah item Pengadaan Mebel	7 Item	46.370.000	Pengadaan Mebel	Garut Kota	Jumlah item Pengadaan Mebel	7 Item	35.136.100	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dibangun	1 Gedung	1,094,685,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Garut Kota				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>363,158,112</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>115.544.112</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100%	82.838.112	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Garut Kota	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	82.838.112	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	10 unit	15.620.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Garut Kota	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	10 unit	17.440.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	2 jenis	264.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	2 jenis	15.266.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,031,911,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.247.403.500</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	26 unit	31.911.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Garut Kota	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	26 unit	29.010.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan yang terpelihara	5 Gedung	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Garut Kota	Jumlah bangunan yang terpelihara	6 Gedung	2.218.393.500	

II	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan</b>		<b>425.413.000</b>	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan</b>		<b>175.675.400</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>		<b>346.346.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>		<b>113.458.400</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	346.346.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Garut Kota	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	113.458.400
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>79.067.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>62.217.000</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Jenis Pelayanan PATEN		79.067.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Garut Kota	Jumlah Jenis Pelayanan PATEN	3 jenis	62.217.000
III	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>16.623.596.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>15.061.211.942</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>12.303.701.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>11.092.337.542</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	179.501.000	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	59.023.500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	10.297.093.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	9.833.320.742
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	1.827.107.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Garut Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan	11 Kelurahan	1.188.679.450
						Evaluasi Kelurahan	Garut Kota	Jumlah pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang berkinerja baik	4 kali	11.314.100

	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>4.319.895.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>3.968.874.400</b>	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	4.319.895.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Garut Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan lembaga Kemasyarakatan	11 Lokasi	3.968.874.400	
<b>IV</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Trantibum</b>		<b>234,898,000</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Trantibum</b>		<b>173.560.000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>234,898,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>173.560.000</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	179.898.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Garut Kota	Jumlah anggota Satpol PP	8 orang	173.560.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah pelaksanaan aktivitas keagamaan	1 Kegiatan	55.000.000			-	-	-	
<b>V</b>						<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan Bidang Pemerintahan Umum</b>			
						<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>159.086.700</b>	
						Pembinaan Wawasan kebangsaan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Garut Kota	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	12 kali	9.026.700	

						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Bimtek	4 Kali	150.060.000	
<b>VI</b>						<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>180.648.250</b>	
						<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>		<b>180.648.250</b>	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen RPTK Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	180.648.250	
<b>JUMLAH</b>					<b>29.762.543.933</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>28.165.892.662</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Garut Kota melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Garut Kota mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C 32 dan T-C 33 berikut ini : (Terlampir)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Garut Kota guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Garut Kota di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Garut Kota mempunyai ***tujuan : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Profesionalisme dalam Pelayanan Publik”***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Predikat SAKIP
4. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Garut Kota**  
**Tahun 2022**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

### **3.3 Program dan Kegiatan.**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Garut Kota sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah



Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Garut Kota diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Garut Kota merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Garut Kota diimplentasikan untuk mencapai target –target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Garut Kota Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2020 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan,

pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Garut Kota diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Garut Kota sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Karacak Valley. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan

kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Garut Kota melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

- b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan
  1. Jumlah Program , Jumlah Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan  
Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 adalah 6 Program, 14 Kegiatan, 48 Sub Kegiatan.
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan  
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Garut Kota dan mencakup semua Kelurahan.
  5. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 28.165.892.662-

Adapun Program Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :
  - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran
  - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan Pengadaan Mebel

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang
    - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Kulon
    - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan

- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margawati
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuwon
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muarasanding
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamentri
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ciwalen
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paminggir
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Regol
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukanegla
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cimuncang
- Evaluasi Kelurahan

❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan

6. Program Pengawasan Pemerintah Desa dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Kecamatan Garut Kota Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 14 Kegiatan, 48 Sub kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sebesar Rp. 28.165.892.662,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp. 12.415.710.370,- dengan kegiatan sebagai berikut :

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 31.559.500,-

❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 8.651.241.950,- dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp. 8.636.448.450,-

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp. 14.793.500,-

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 66.800.000,- Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp. 66.800.000,-

❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp. 1.268.025.208,- dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 82.072.300,-

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 650.251.408,-

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 38.541.600,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 195.598.400,-

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 42.211.500,-

- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 171.150.000,-

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp. 88.200.000,-
  - ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah Rp. 35.136.100,- dengan Sub kegiatan :
    - Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 35.136.100,-
  - ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah Rp. 115.544.112,- dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 82.838.112,-
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 17.440.000,-
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp. 15.266.000,-
  - ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran Rp. 2.247.403.500,- dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran sebesar Rp. 29.010.000,-
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran Rp. 2.218.393.500,-
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, jumlah anggaran Rp. 175.675.400,- dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 113.458.400,- dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, anggaran Rp.113.458.400,-
  - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, jumlah anggaran Rp. 62.217.000,- dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 71.879.500,-
8. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran Rp. 15.061.211.942,- dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan anggaran Rp. 11.092.337.542,- dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, anggaran Rp. 59.023.250,-



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon, anggaran Rp. 941.312.400,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan, anggaran Rp. 831.470.400,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati, anggaran Rp. 914.836.300,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon, anggaran Rp. 796.413.660,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding, anggaran Rp. 915.654.000,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri, anggaran Rp. 965.891.000,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen, anggaran Rp. 798.379.100,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir, anggaran Rp. 949.853.650,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol, anggaran Rp. 849.000.000,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla, anggaran Rp. 958.731.632,-
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang, anggaran Rp. 911.778.600,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Kulon, anggaran sebesar Rp. 60.687.600,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan, anggaran sebesar Rp. 170.529.600,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margawati, anggaran sebesar Rp. 87.163.700,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuwon, anggaran sebesar Rp. 205.586.400,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muarasanding, anggaran sebesar Rp. 86.346.000,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamentri, anggaran sebesar Rp. 36.109.000,-
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ciwalen, anggaran sebesar Rp. 203.620.900,-



- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paminggir, anggaran sebesar Rp. 52.146.350,-
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Regol, anggaran sebesar Rp. 153.000.000,-
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukanegla, anggaran sebesar Rp. 43.268.500,-
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cimuncang, anggaran sebesar Rp. 90.221.400,-
  - Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp. 11.314.100,-
  - ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 3.968.874.400,- dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, anggaran sebesar Rp. 3.968.874.400,-
9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, anggaran Rp. 173.560.000,- dengan Sub Kegiatan :
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, anggaran Rp. 173.560.000,-
10. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 159.086.700, dengan Sub Kegiatan :
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah anggaran Rp. 9.026.700,-
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 150.060.000,-
11. Program Pengawasan Pemerintah Desa dengan Kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, anggaran Rp. 180.648.250,- dengan Sub Kegiatan :
    - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan jumlah anggaran Rp. 180.648.250,-

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Garut Kota. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Garut Kota dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Garut Kota

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Garut Kota.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Garut Kota ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi Rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera”**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**